

Sanksi Tilang Kendaraan tak Lolos Uji Emisi Mulai 13 November 2021

JAKARTA (IM) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta kembali menggelar razia uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Razia ini dilakukan dalam rangka sosialisasi. Pelanggar hanya dikenakan tarif parkir tinggi saat ini. "Sehingga masyarakat bisa mengetahui lebih masif bahwa Jakarta sudah memulai pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (26/10).

Syafrin mengatakan pemilik kendaraan yang tidak lulus uji emisi akan terdaftar di database Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Data itu terintegrasi dengan sejumlah lokasi parkir yang menerapkan prinsip disinsentif tarif parkir tinggi bagi kendaraan tidak lulus uji emisi.

Lokasi parkir yang dimaksud antara lain IRTI Monas, Blok M Square, Samsat Jakarta Barat, Pasar Mayestik, dan Park and Ride Terminal Kalideres.

"Sehingga yang harusnya Rp 5 ribu per jam, saat ini menjadi Rp 7 ribu," kata dia.

Syafrin mengatakan sosialisasi ini mulai diterapkan kembali per 12 Oktober 2021. Sosialisasi sebenarnya sudah pernah dilakukan pada Januari lalu. Namun, kata Syafrin, pandemi Covid-19 membuat kegiatan tertunda sejenak.

Syafrin mengatakan sanksi tilang baru akan diterapkan mulai 13 November 2021 atau setelah sosialisasi ini selesai. Tilang akan dilakukan oleh anggota Polri.

"Yang melakukan pelanggaran akan dikenakan Pasal 285 dan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata Syafrin.

Syafrin berujar, besaran denda kendaraan yang tak memenuhi standar uji emisi bervariasi. Untuk kendaraan roda dua, denda maksimal sebesar Rp 250 ribu. Sementara denda roda empat adalah Rp 500 ribu. ● yan

Serikat Buruh Minta UMP DKI Jakarta Naik Jadi Rp5,3 Juta

JAKARTA (IM) - Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi Rp 5,3 juta.

Ketua DPW FSPMI DKI Jakarta, Winarso mengatakan, angka Rp 5,3 juta didapat dari survei yang dilakukan serikat buruh. "Berdasarkan survei pasar seharga Rp 5.305.000, itu cukup setahun," kata Winarso ditemui saat aksi demonstrasi kenaikan UMP di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/10). Namun, jika tuntutan tersebut tak dipenuhi, Winarso mengatakan, serikat buruh tetap menargetkan UMP DKI 2022 naik paling sedikit 10 persen dari upah tahun 2021. "Target kami naik 10 persen dari Rp 4,4 juta, jadi kira-kira Rp 4,8 juta," ucap dia.

Untuk itu, dia bersama

pewakikan serikat buruh lainnya meminta untuk bertemu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Winarso mengatakan, Anies sudah sepatutnya mengeluarkan kebijakan untuk memutuskan UMP Jakarta naik di angka yang sesuai dengan survei pasar yang dilakukan serikat buruh.

"Tidak ada lagi, ketika Gubernur (lebih memihak) melihat perusahaan, kami warga Jakarta yang berhak bahagia, berhak hidup layak dan berhak sejahtera," kata dia.

Setelah beberapa waktu melakukan orasi, 10 orang perwakilan serikat buruh diterima masuk ke gedung Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 11.50 WIB. Seorang petugas Satpol PP yang ikut mengantar mengatakan, para perwakilan akan diantar ke Blok H untuk menemui Kesbangpol DKI Jakarta dan membicarakan tuntutan dari serikat buruh. ● yan



FOTO/ANT

UNJUK RASA BURUH DI JAKARTA

Buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (26/10). Unjuk rasa buruh dari berbagai elemen itu menuntut pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan sebesar 10 persen.

Sudah tak Ada Zona Merah dan Oranye di Jakarta

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur atau Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan, sejak Senin (25/10), sudah tidak ada lagi kawasan Rukun Tetangga (RT) di DKI Jakarta yang berstatus zona merah dan oranye penyebaran Covid-19. Selain itu, kata Riza, jumlah kematian akibat Covid-19 di Ibu Kota pun dapat ditekan.

Dalam 20 hari terakhir, lanjut dia, terdapat 9 hari di mana tercatat nol kematian akibat Covid-19. Riza juga memastikan target vaksinasi terhadap 11,4 juta orang di DKI akan terealisasi bulan depan. "Data ini harus membuat kita semakin meningkatkan disiplin. Karena kita tidak ingin kasus naik lagi," tulis Riza di akun Instagramnya, @arizapatria, pada Selasa (26/10).

Riza menyebut berdasarkan pemantauan Pemprov DKI, kepatuhan memakai masker di DKI Jakarta tercatat sebesar 92,51 persen, sedangkan upaya menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebesar 86,5 persen.

Meski begitu, Riza mengatakan sederet pencapaian itu merupakan peringatan agar warga tak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. "Kita pasti akan kembali ke zona merah dan oranye jika tidak disiplin," ujar Wagub DKI.

Penambahan kasus Covid-19 di DKI Jakarta belakangan ini memang relatif rendah. Teranyar, kemarin

Dinas Kesehatan mencatat ada 82 kasus konfirmasi positif Covid-19 baru. Sementara jumlah kasus aktif turun sebanyak 86 kasus. Sehingga tercatat ada 1.053 penderita Covid-19 yang kini masih dirawat atau menjalani isolasi.

Adapun selama sepekan terakhir Dinas Kesehatan mencatat persentase kasus positif Covid-19 di Ibu Kota sebesar 0,5 persen. Jumlah itu berada di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO, di mana positivity rate suatu daerah tak boleh lebih dari 5 persen. Untuk program vaksinasi, per kemarin, sebanyak 10.829.633 orang telah menerima vaksin dosis pertama, sedangkan untuk dosis kedua sebanyak 8.257.773 orang.

Data RT Rawan per wilayah periode 25-31 Oktober 2021:

- Jakarta Barat: 6.499 RT - kuning: 102 - hijau: 6.397
- Jakarta Pusat: 4.553 RT - kuning: 34 - hijau: 4.519
- Jakarta Selatan: 6.073 RT - kuning: 60 - hijau: 6.013
- Jakarta Timur: 7.940 RT - kuning: 105 - hijau: 7.835
- Jakarta Utara: 5.290 RT - kuning: 123 - hijau: 5.167
- Kepulauan Seribu: 127 RT - kuning: - - hijau: 127

Total:
- RT zona kuning: 424
- RT zona hijau: 30.058
- Jumlah RT di Jakarta: 30.428. ● yan

4 Metropolis

IDN/ANTARA



PENGUNAAN NIK UNTUK

PEMESANAN TIKET KA JARAK JAUH

Calon penumpang Kereta Api (KA) Jarak Jauh keluar dari tempat loket pembelian tiket di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (26/10). PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mulai 26 Oktober 2021 menerapkan ketentuan baru untuk pemesanan tiket kereta api (KA) jarak jauh dengan wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) baik bagi penumpang dewasa maupun anak-anak, sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA) wajib menggunakan nomor identitas yang ada pada paspor.

Ahli Ingatkan DKI Belum Aman Meski Vaksin Kedua Capai 92%

Kepala Bidang PAEI, Masdalina Pane meminta pemerintah untuk aktif melakukan pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) agar sebaran varian-varian baru dapat segera diidentifikasi, dan kemudian proses penelusuran kontak erat dapat segera dilakukan secara agresif sebelum penularan semakin menyebar luas.

JAKARTA (IM) - Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menyebut kondisi pandemi virus korona (Covid-19) di DKI Jakarta belum bisa dikatakan aman, kendati capaian vaksinasi Covid-19 di Ibu kota telah mencapai 92 persen pada dosis kedua. Masdalina menyebut, program vaksinasi bisa 'ambay' apabila sebaran mutasi virus SARS-CoV-2 yang memiliki kemampuan melarikan diri dari antibodi vaksin, seperti varian B.1.621 atau yang dikenal varian Mu teridentifikasi di Indonesia.

"Varian Mu yang bisa escape antibodi. Jadi 70 triliun yang dikeluarkan pemerintah, kalau varian itu masuk dan banyak, itu tidak terlalu ada dampaknya. Tetap mereka bisa

saja terinfeksi dan berat," kata Masdalina, Selasa (26/10). Masdalina lantas meminta pemerintah untuk aktif melakukan pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) agar sebaran varian-varian baru dapat segera diidentifikasi, dan kemudian proses penelusuran kontak erat dapat segera dilakukan secara agresif sebelum penularan semakin menyebar luas.

Kendati demikian, Masdalina menyebut varian Mu tidak separah varian Delta dalam hal daya tular dan meningkatkan risiko keparahan gejala klinis ataupun perburukan gejala pada pasien Covid-19.

"Kalau dari Delta tidak lebih parah ya, karena Mu ini reproduction number tidak seperti Delta yang sampai 6-8 kasus," kata dia.

Masdalina juga mengungkap DKI Jakarta patut menjadi sorotan lantaran program vaksinasi Covid-19 DKI dilaksanakan lebih awal ketimbang daerah-daerah lain. Dengan begitu ketahanan antibodi pada masyarakat DKI sudah cukup menurun pada Oktober ini.

Masdalina masih optimistis DKI Jakarta sudah cukup bisa mengendalikan pandemi Covid-19, dibuktikan dengan penurunan kasus secara signifikan selama 15 pekan. Kendati pada pekan lalu ada penambahan yang menurutnya masih ideal.

Kemenkes per Senin (25/10) Pukul 12.00 WIB mencatat 113.424.379 orang telah menerima suntikan dosis pertama vaksin virus korona. Sementara itu, baru 68.264.009

orang yang telah rampung menerima dua dosis suntikan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Dengan demikian, target vaksinasi pemerintah dari total sasaran 208.265.720 orang baru menyetujui 54,46 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di angka 32,78 persen.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta per 25 Oktober 2021 mencatat 10.829.633 orang telah menerima suntikan dosis pertama di Ibu Kota. Dari jumlah itu, 80 persen di antaranya merupakan

warga dengan KTP asli DKI, dan sisanya Non-DKI.

Kemudian untuk vaksinasi kedua, Pemprov mencatat 8.257.773 orang rampung menerima vaksinasi secara lengkap. Adapun dari jumlah capaian itu, 64 persen merupakan warga dengan KTP DKI, dan sisanya warga KTP lain.

Dengan demikian, target vaksinasi Pemprov DKI dari total sasaran 8.941.211 orang telah menyetujui 121,1 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di persentase capaian 92,4 persen. ● yan

Pemprov DKI Klaim Selalu Transparan dalam Isu Reklamasi

JAKARTA (IM) - Menanggapi laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta soal reklamasi, Pemprov DKI Jakarta menekankan selalu transparan dalam isu reklamasi, pasalnya keputusan penghentian reklamasi sudah melalui kajian mendalam bersama peneliti.

"Transparansi selalu kami kedepankan dalam membahas reklamasi. Setidaknya ada 10 kali FGD yang diadakan, di mana LBH juga selalu turut kami undang dan hadir dalam beberapa kesempatan. Hasil FGD memutuskan agar pulau yang sudah terbangun tidak dibongkar kembali karena akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Sehingga kami, Pemprov DKI Jakarta kemudian berupaya untuk memanfaatkan dan mengelola pulau yang sudah terbangun untuk kepentingan publik," kata Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Widjarmoko, kemarin.

Lebih lanjut, Sigit menyampaikan pembangunan 13 pulau reklamasi sendiri saat ini telah dihentikan dan bekerja di balik proses pembangunan gereja GBKP Tugu. Mudah-mudahan bisa segera tuntas proses pembangunannya dengan tepat kualitas, tepat waktu dan tepat biaya. Semoga Natal tahun depan sudah bisa dipakainya untuk beribadah," tutupnya. ● yan

itu, tindakan yang belum sesuai standar yang telah disampaikan LBH Jakarta, akan menjadi catatan ke depannya, untuk terus melakukan perbaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Pengacara LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait mengatakan, pencabutan izin reklamasi di Teluk Jakarta yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan hanya gimik belaka.

Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta menang di tingkat Mahkamah Agung untuk gugatan Pulau H, namun kalah di gugatan lain seperti Pulau F dan Pulau G.

"Ketidaktercermatan Pemprov dalam pencabutan izin tentunya mengancam masa depan penghentian reklamasi dan menjadikan pencabutan izin reklamasi sebagai gimmick belaka," kata Jeanny dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/10).

Dalam Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta menjadi indikasi reklamasi masih akan berlanjut. Yakni dengan pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi serta penyebutan pengembangan reklamasi sebagai perusahaan mitra. Jeanny menyebut saat pencabutan izin 13 pulau reklamasi dilakukan secara tidak cermat dan segera.

"Pemprov DKI Jakarta tidak memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk mencabut izin pelaksanaan reklamasi bagi perusahaan-perusahaan," tuturnya.

Selain itu, dia menyebut, Anies tidak mendahului transparansi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). "Ketiadaan kajian tersebut terlihat kompromistis karena Anies tetap melanjutkan 3 pulau lainnya. Walhasil gelombang gugatan balik dari pengembang pun terjadi," katanya. ● yan

HADIRI PELETAKAN BATU PERTAMA GEREJA BATAK KARO

Anies: Persatuan Harus Dirawat

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan turut menghadiri Peletakan Batu Pertama pembangunan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Tugu, Jakarta Utara, Selasa (26/10). Anies menyampaikan rasa terima kasih atas undangan tersebut.

"GBKP selalu mengirimkan pesan keterbukaan, dan itu membuat keberadaan dari GBKP jadi kebaikan bagi berbagai unsur masyarakat di Indonesia," kata Anies di Jakarta Utara, Selasa (26/10).

Bangsa Indonesia memang beragam, tapi yang hebatnya bukan keberagamannya, masih banyak bangsa lain yang lebih beragam. "Yang hebat dari

Indonesia adalah di sini ada persatuan, di sini ada kebersamaan," kata Anies.

"Persatuan harus dirawat dengan memberikan perasaan kesetaraan dan Jakarta adalah rumah bagi semua. Jakarta adalah tempat bagi semua merasakan dipayungi diayomi, termasuk untuk kegiatan peradatan," tambahnya.

Setiap tempat ibadah hadir, dia meyakini bukan saja jemaatnya yang berada di dalam rumah ibadah tapi juga masyarakat yang berada di lingkungan tempat ibadah, karena itu adalah satu kesatuan yang akan terus berinteraksi secara dekat.

"Kita ingin seluruh unsur

masyarakat di Jakarta merasa bersyukur tinggal di Jakarta karena difasilitasi untuk kegiatan rohaniyah, termasuk ketika melakukan pembangunan tempat-tempat ibadah," tegas Anies.

Mantan Mendikbud itu berharap agar pembangunan segera selesai dan gereja tersebut bisa dimanfaatkan jemaat. "Selamat kepada semua yang bekerja di balik proses pembangunan gereja GBKP Tugu. Mudah-mudahan bisa segera tuntas proses pembangunannya dengan tepat kualitas, tepat waktu dan tepat biaya. Semoga Natal tahun depan sudah bisa dipakainya untuk beribadah," tutupnya. ● yan



IDN/ANTARA

INDEKS BELANJA MASYARAKAT MENINGKAT

Pedagang ayam potong melayani pembeli yang berbelanja di kawasan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (25/10). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan indeks belanja masyarakat hingga awal Oktober 2021 mengalami kenaikan dan sudah kembali ke level sebelum adanya pandemi COVID-19 dengan indeks nilai belanja mencapai 106,2 dan frekuensi belanja mencapai 120,9 seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.

PENGUMUMAN
Diumumkan bahwa **PT. KARUNIA WJAYA SENTOSA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah dibubarkan tanggal 25 Oktober 2021, berdasarkan akta Berita Acara tertanggal 25 Oktober 2021 Nomor 22, yang dibuat dihadapan MELINDA SIDARTA, SH. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Likwidator di Kantor Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak pengumuman ini.
Jakarta, 27 Oktober 2021
Tim Likuidasi
PT. KARUNIA WJAYA SENTOSA